



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021-2025

A. KELOMPOK SASARAN PEREMPUAN

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di	1. Melakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Desa, Pembangunan	Menurunnya jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap

perempuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	tingkat nasional maupun daerah.	undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah.	3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Sekretaris Mahkamah Agung. 4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 5. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	perempuan.
			2. Melakukan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Pemerintah Daerah Provinsi.	Meningkatnya produk hukum dan kebijakan yang kondusif terhadap

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			yang berperspektif perempuan.		3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	perempuan.
2.	Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak	Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan	1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan.

swasta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	swasta.		peraturan perundang-undangan.	5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Kementerian Luar Negeri.	
			2. Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Perindustrian. 2. Kementerian Ketenagakerjaan. 3. Kementerian Perdagangan. 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

3. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
3.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. Peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan	Percepatan, penanganan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Sekretaris Mahkamah Agung. 3. Kejaksaan RI. 4. Kepolisian Negara RI.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Dalam Negeri. 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Meningkatnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin dan menangani perempuan berhadapan dengan hukum

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		dengan hukum.			4. Kementerian Sosial. 5. Kementerian Kesehatan. 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 8. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

b. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.	1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum. 2. Memaksimalkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.		6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	
			3. Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.		

4. Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		
			4. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial perempuan berhadapan dengan hukum.

c. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		c. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.	1. Realisasi pemulihan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kepolisian Negara RI. 3. Kejaksaan RI. 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Dalam Negeri. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Kesehatan.	Perempuan berhadapan dengan hukum, terutama korban kekerasan, mendapatkan pemulihan secara menyeluruh dan efektif.
			2. Membentuk mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak perempuan dalam	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Sekretaris Mahkamah Agung.	5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Terpenuhinya hak perempuan dalam hukum keluarga (perdata).

hukum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			hukum keluarga (perdata).		7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	
4.	Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	1. Peningkatan akses layanan kesehatan yang layak dan penyediaan obat bagi perempuan penderita HIV/AIDS.	1. Kementerian Kesehatan. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terpenuhinya hak layanan kesehatan bagi perempuan penderita HIV/AIDS.

2. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			2. Melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi perempuan penghayat kepercayaan dan pekerja migran Indonesia.	Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terpenuhinya kepemilikan KTP bagi perempuan penghayat kepercayaan, dan pekerja migran Indonesia.

B. KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

B. KELOMPOK SASARAN ANAK

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	<p>1. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok:</p> <p>a. Penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Anak.</p> <p>b. Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan.</p>	<p>Kementerian Sosial.</p> <p>Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>3. Kementerian Agama.</p> <p>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>5. Kepolisian Negara RI.</p>	Terpenuhinya hak anak atas administrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni Balai Rehabilitasi Sosial Anak, Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, panti asuhan/sosial, Kelompok

c. Panti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			c. Panti Asuhan/ Sosial. d. Kelompok Masyarakat Adat. e. Penghayat kepercayaan. f. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS). g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum. h. Anak luar kawin.	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	6. Kejaksaan RI. 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Masyarakat Adat, penghayat kepercayaan, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak luar kawin, dan Pekerja Migran Indonesia.
			i. Pekerja Migran Indonesia.	Kementerian Luar Negeri.		

2. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			2. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan. b. Kelompok Masyarakat Adat. c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Kementerian Agama. 5. Kepolisian Negara RI. 6. Kejaksaan RI.	Terpenuhinya hak-hak atas pendidikan: anak-anak di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara, Penghuni Lembaga

d. Penghuni . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara. e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Pembinaan Khusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.
			f. Pekerja Migran Indonesia.	Kementerian Luar Negeri.		
			3. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:		1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Desa, Pembangunan	Terpenuhinya hak-hak kesehatan bagi anak-anak di wilayah Terdepan, Terpencil

a. Tinggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			a. Tinggal di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan. b. Kelompok Masyarakat Adat. c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Kesehatan. 6. Kepolisian Negara RI. 7. Kejaksaan RI. 8. Badan Pelindungan	dan Tertinggal, dan/atau kantong kemiskinan, Kelompok Masyarakat Adat, Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara, Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Pekerja Migran Indonesia.
			d. Penghuni Lembaga Penempatan Anak Sementara.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		

e. Penghuni . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			e. Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.		Pekerja Migran Indonesia. 9. Pemerintah Daerah Provinsi. 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
			f. Pekerja Migran Indonesia.	Kementerian Luar Negeri.		
			4. Pemberian layanan khusus kepada anak dalam situasi resiko kebencanaan.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Sosial. 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	1. Kementerian Kesehatan. 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Pemerintah Daerah Provinsi.	Terpenuhinya hak anak di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dalam situasi resiko kebencanaan.

5. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
					5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
2.	Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.	Penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak di ranah siber dan digital.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4. Kepolisian Negara RI.	1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2. Komisi Penyiaran Indonesia. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya upaya pencegahan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi anak-anak di ranah siber dan digital.

5. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				5. Badan Siber dan Sandi Negara.		
3.	Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.	Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	1. Menyusun dan melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Sosial. 2. Kejaksaan RI. 3. Kepolisian Negara RI. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 6. Pemerintah Daerah Provinsi.	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
					7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
			2. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang efektif menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kepolisian Negara RI. 4. Kejaksaan RI. 5. Sekretaris Mahkamah Agung.	1. Lembaga Administrasi Negara. 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
4.	Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.	Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.	Meningkatkan upaya perlindungan anak dari perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Luar Negeri. 4. Kepolisian Negara RI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Perhubungan. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Ketenagakerjaan. 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya respon cepat dan penanganan efektif atas kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat dan daerah. 2. Adanya bimbingan teknis bagi seluruh petugas di Perwakilan RI di luar negeri dalam menangani

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
					8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.	kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan WNI anak sebagai korban.
5.	Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha	Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan	Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.	1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Pemerintah	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pertanian. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Menurunnya jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	usaha milik negara/daerah dan swasta.		Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	4. Kementerian Dalam Negeri. 5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	
6.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:				

1. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		1. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	1. Kementerian Hukum* dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Nasional/ Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

C. KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

C. KELOMPOK SASARAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	1. Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Kementerian Keuangan. 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diterbitkannya Peraturan setingkat Menteri atau Pimpinan Lembaga terkait dengan

2. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				2. Badan Kepegawaian Negara.		penerimaan pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
			2. Melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan baru yang memasukkan aspek perlindungan

Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.			penyandang disabilitas. 2. Menurunnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
			3. Melakukan kajian/evaluasi produk hukum daerah yang	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Hukum dan Hak	1. Kementerian Sosial. 2. Pemerintah Daerah Provinsi.	1. Meningkatnya jumlah produk hukum di daerah yang memasukkan

berkaitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Asasi Manusia.	3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	aspek perlindungan penyandang disabilitas. 2. Menurunnya jumlah produk hukum daerah yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2.	Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak	Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi				

dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi:	penyandang disabilitas, meliputi:				
	a. Ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi.	a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi.	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Kementerian Agama. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	1. Meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.

Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Riset, 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 3. Kementerian Keuangan. 4. Pemerintah Daerah Provinsi. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kebutuhan penyandang disabilitas di bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	b. Ketersediaan layanan kesehatan	b. Peningkatan jumlah pelayanan	1. Melaksanakan Peta Jalan Kesehatan	Kementerian Kesehatan.	1. Kementerian Dalam Negeri.	Meningkatnya jumlah layanan kesehatan

bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	Inklusif.		2. Kementerian Sosial. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	berkualitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
			2. Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	1. Kementerian Kesehatan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Dalam Negeri.	Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

c. Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	c. Jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	c. Tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	1. Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2. Kementerian Perindustrian. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 4. Badan Usaha Milik Daerah.	1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas.

2. Tersedianya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
						2. Tersedianya data jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta.
	d. Layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	d. Tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas.	Peningkatan akses layanan-layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas.	Kementerian Sosial.	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2. Kementerian Keuangan. 3. Otoritas Jasa Keuangan.	Meningkatnya aksesibilitas layanan keuangan bagi penyandang disabilitas.
	e. Pemenuhan hak	e. Tersedianya hak	1. Implementasi pemberian	Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Sosial.	Meningkatnya jumlah daerah yang

pelindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	pelindungan sosial penyandang disabilitas.	bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Meningkatnya jumlah daerah yang memasukkan aspek bantuan sosial kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			2. Penguatan program Desa Inklusif dan Pemberian layanan hak-hak penyandang disabilitas melalui dana desa.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan anggaran penyandang disabilitas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3.	Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	1. Peningkatan perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. 2. Membangun sistem pendataan	Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial.	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Dalam Negeri.	Terpenuhinya perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. 1. Adanya peta jalan perumusan data

terpilah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
			terpilah penyandang disabilitas yang terintegrasi.		2. Badan Pusat Statistik. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	terpilah nasional penyandang disabilitas. 2. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam sistem pendataan nasional secara terpilah berdasarkan ragam disabilitas, kebutuhan alat bantu, akomodasi yang layak, dan aksesibilitas.

4. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
4.	Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang:	Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang:				
	a. Transportasi darat, udara, dan laut.	a. Transportasi darat, udara, dan laut.	Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.	1. Kementerian Perhubungan. 2. Pemerintah Daerah Provinsi. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi darat, laut, dan udara.

2. Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
						2. Meningkatnya jumlah layanan transportasi yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah.
	b. Tempat ibadah.	b. Tempat ibadah.	Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat-tempat ibadah bagi penyandang disabilitas.	Kementerian Agama.	1. Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya aksesibilitas, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah.

c. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	c. Sistem peradilan inklusif.	c. Peradilan inklusif.	Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Sekretaris Mahkamah Agung. 3. Kejaksaan RI. 4. Kepolisian Negara RI. 5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2. Kementerian Sosial.	Meningkatnya sarana dan prasarana, fisik dan non-fisik, di lembaga-lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas.

5. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
5.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi:				
		1. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	1. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

2. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	2. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

D. KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

D. KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
1.	Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.	1. Peningkatan perekaman KTP elektronik bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Kementerian Dalam Negeri.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi. 5. Pemerintah Daerah	Terpenuhinya perekaman KTP elektronik bagi Kelompok Masyarakat Adat.
			2. Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Kelompok Masyarakat Adat.	Kementerian Dalam Negeri.		Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.
				1. Kementerian Sosial. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan		Adanya jaminan hukum dan perlindungan bagi Kelompok Masyarakat Adat dari praktik

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Perlindungan Anak.	6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	diskriminasi dan kekerasan
			3. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Kementerian Dalam Negeri.	Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

2. Masih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
2.	Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.	Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.	Melaksanakan upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan.	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Sosial. 4. Kepolisian Negara RI. 5. Kejaksaan RI. 6. Sekretaris Mahkamah Agung. 7. Pemerintah Daerah Provinsi. 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat.

3. Kurangnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
3.	Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha badan usaha	Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik	Mendorong partisipasi Kelompok Masyarakat Adat dalam proses perizinan perusahaan/ perkebunan yang potensial berdampak bagi Kelompok Masyarakat Adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 	Adanya partisipasi Kelompok Masyarakat Adat dalam proses perizinan perusahaan/perkebunan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

milik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
	milik negara/daerah.	negara/daerah.		5. Pemerintah Daerah Provinsi.		
4.	Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:				
		1. Penyediaan layanan bantuan	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Kementerian Dalam Negeri.	Kelompok Masyarakat Adat berhadapan dengan hukum mendapatkan

hukum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
		hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Sekretaris Mahkamah Agung. 5. Pemerintah Daerah Provinsi. 6. Pemerintah	2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	keadilan atas kekerasan yang dialami dalam proses penegakan hukum.

Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Daerah Kabupaten/Kota.		
		2. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Pemerintah	1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Sosial. 3. Kementerian Kesehatan. 4. Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.	Peningkatan layanan kesehatan fisik dan psikososial Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	TANTANGAN STRATEGIS (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	AKSI HAM (3)	PENANGGUNG JAWAB (4)	INSTANSI TERKAIT (5)	KRITERIA KEBERHASILAN (6)
				Daerah Kabupaten/Kota.	6. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

